

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Problematika Hukum Penerbitan Izin Lingkungan dengan Berlakunya Fiktif Positif. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Izin Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berlakunya fiktif positif dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Berlakunya fiktif positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam penerbitan Izin Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dengan komitmen berpengaruh terhadap eksistensi Izin Lingkungan yang lebih menekankan pada formalitas pemberian Izin Lingkungan karena penerbitan izin secara formal di awal kemudian keputusan kelayakan diterbitkan karena adanya keterlambatan memberikan respon. Akibat hukum berlakunya fiktif positif dalam penerbitan Izin Lingkungan adalah masuknya kewenangan pengadilan dalam ranah eksekutif dan tertutupnya upaya hukum atas putusan fiktif positif karena sifat putusannya yang final dan mengikat. Sehingga, diperlukan perubahan pengaturan dalam mekanisme pemberian Izin Lingkungan dan harmonisasi serta sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait.

Kata Kunci: Fiktif Positif, Izin Lingkungan, Akibat Hukum, Upaya Hukum.

ABSTRACT

This research discusses the Legal Problematic of Environmental Permits with the Enactment of Fictitious Approval. This research is a doctrinal research that uses statutory approach, case approach and conceptual approach. This research aims to determine the existence of environmental permit in the protection and management of the environment with the enactment of fictitious approval and the legal consequences it causes. The enactment of fictitious approval that determined in Law Number 30/2014 to the issuance of Environmental Permits based on Government Regulation Number 24/2018 with a commitment can be affecting to the existence of Environmental Permits that more emphasize on the formality of giving Environmental Permits because the permits issued formally at the beginning, then the advisability decision is issued because of the delays in responding. The legal consequences of the enactment of fictitious approval in the issuance of environmental permits are the entering of court into the executive authority and the closure of legal efforts for fictitious approval judgement due to the characteristics of the judgement that are final and binding. So, it is necessary to changing the regulation of the mechanism for issuance the Environmental Permits, then it is necessary to harmonizing and synchronizing the related laws and regulations.

Keywords : *Fictitious Approval, Environmental Permit, Legal Consequences, Legal Efforts.*